

Judul : Kemenkes Lanjutkan Proyek Vaksin - DPR Minta Pemerintah Hormati Proses Hukum
Tanggal : Sabtu, 09 Februari 2013
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 3

Kemenkes Lanjutkan Proyek Vaksin

DPR Minta Pemerintah Hormati Proses Hukum

JAKARTA – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersikeras melanjutkan proyek pembangunan pabrik vaksin flu burung. Penghentian proyek tersebut dinilai berpotensi merugikan negara minimal Rp900 miliar.

Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Ali Ghufron Mukti mengatakan hasil kajian tim independen merekomendasikan agar proyek vaksin flu burung dilanjutkan. Namun, masih dibutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp300 miliar-500 miliar untuk penyelesaian proyek. Apalagi Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR memberikan lampu hijau agar proyek dilanjutkan. "Kita tetap ingin ini dilanjutkan dengan kebutuhan anggaran tambahan Rp300 miliar-500 miliar," ungkap Wamenkes di Jakarta kemarin.

Menurut dia, kerugian yang ditanggung negara akan bertambah besar jika proyek pembangunan pabrik vaksin ini dihentikan. Ali menyebutkan, kerugian yang ditanggung negara bisa mencapai Rp900 miliar, sebab anggaran yang sudah terpakai untuk pembangunan pabrik dan pengadaan alat sudah sebesar itu. Potensi kerugian yang lebih besar tersebut yang menjadi salah satu pertimbangan untuk melanjutkan proyek. "Jadi kerugian negara minimal bisa mencapai itu jika ini dihentikan," ujarnya.

Selain berpotensi menimbulkan kerugian yang lebih besar, alasan lain Kemenkes ingin melanjutkan proyek didasari kebutuhan untuk memproduksi vaksin flu burung. Ali menjelaskan, kemampuan untuk memproduksi vaksin dalam jumlah besar tidak dapat dilakukan jika proyek dihentikan. Di sisi lain, keberadaan pabrik vaksin dibutuhkan untuk mengantisipasi adanya epidemi atau pandemi flu burung. "Kalau ini dihentikan, kemampuan kita memproduksi dalam skala besar akan berkurang," terangnya.

Wamenkes tidak menampik bahwa sampai saat ini proses hukum atas adanya dugaan korupsi proyek itu masih berlangsung. Namun, kementeriannya ingin agar proses hukum tetap berjalan tanpa harus menghentikan proyek pembangunan pabrik vaksin. Artinya, proses hukum tetap jalan, sedangkan proyek pembangunan juga terus dilanjutkan hingga selesai. "Tentu proyek ini dilanjutkan dengan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan aturan. Proses hukum silakan dituntaskan," ucapnya.

Anggota Komisi VIII DPR Riski Sadik mengatakan, pihaknya belum bisa memberikan rekomendasi apa pun perihal proyek pembangunan pabrik vaksin sebelum ada keputusan dari hasil kerja Panitia Kerja (Panja) Flu Burung. Kerugian yang lebih besar terjadi akibat kesalahan di masa lampau. Karena itu, pihaknya lebih mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam mengambil keputusan. "Kita tidak akan merekomendasikan untuk melanjutkan atau menyetujui tambahan anggaran sebelum ada dari Panja," katanya.

"Saya pribadi melihat bahaya ini adalah sungguh merupakan suatu upaya yang sangat aneh. Ini menunjukkan Kemenkes seolah tidak paham masalah hukum yang berjalan."

POEMPIDA HIDAYATULLOH
Anggota Komisi IX DPR
dari Fraksi Golkar

Menurut dia, barang yang telanjur dibeli dan bangunan yang sudah didirikan tidak bisa dijadikan alasan untuk melanjutkan proyek pabrik vaksin. Pihaknya tidak ingin melanjutkan proyek justru menimbulkan kerugian negara yang kedua

kali. Permasalahan ini harus disikapi dengan hati-hati, jangan sampai menimbulkan kerugian di kemudian hari. "Jadi ini memang simalakama, tapi harus kita hadapi. Kita tidak ingin dipermasalahkan karena melanjutkan proyek bermasalah," tuturnya.

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Golkar Poempida Hidayatulloh mempertanyakan keinginan Kemenkes dan BAKN DPR melanjutkan proyek pembangunan pabrik vaksin flu burung bersama dengan BUMN PT Bio Farma. Dia menilai Kemenkes tidak memahami permasalahan hukum yang sedang berjalan. "Saya pribadi melihat bahaya ini adalah sungguh merupakan suatu upaya yang sangat aneh. Ini menunjukkan Kemenkes seolah tidak paham masalah hukum yang berjalan," kata Poempida.

Dia menyarankan agar upaya Kemenkes untuk melanjutkan proyek tersebut dihentikan hingga masalah hukumnya selesai. Poempida bahkan menekankan agar Kemenkes mengatur strategi lain untuk mengatasi wabah, terlebih jika terjadi wabah pandemi seperti yang pernah terjadi sebelumnya.

"Sederhananya saya mengimbau agar upaya Kemenkes untuk melanjutkan proyek pabrik vaksin tersebut dihentikan saja. Paling tidak sampai masalah hukumnya nanti selesai," imbuhnya.

● andi setiawan